

**PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*
(STUDI EMPIRIS KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE 2017-2021)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)



Oleh:

DWI TIA NINGRUM

NIM 4319026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*
(STUDI EMPIRIS KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE 2017-2021)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)



Oleh:

DWI TIA NINGRUM

NIM 4319026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Tia Ningrum

NIM : 4319026

Judul Skripsi : **Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun Periode 2017-2021)**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Januari 2023

Yang Menyatakan



Dwi Tia Ningrum

NOTA PEMBIMBING

Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak., MSA., CA

Jl. Gajahmada Gang Kasuari Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dwi Tia Ningrum

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Dwi Tia Ningrum**

NIM : **4319026**

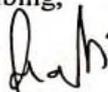
Judul Skripsi : **Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun Periode 2017-2021)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Januari 2023

Pembimbing,



Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak., MSA., CA

NIP. 19870630201 2 001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **Dwi Tia Ningrum**

NIM : **4319026**

Judul Skripsi : **Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I

H. Muhammad Nasrullah, S.E., M.S.I

NIP. 198011282006041003

Penguji II

Muhammad Sultan Mubarak, S.E.Sv., M.E

NIP. 199108282019031006

Pekalongan, 06 Maret 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H

NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”

-Q.S. Al- Insyirah: 6-7

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulis skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suyanto dan Ibu Chasani atas segala bentukdukungan moral, material, doa dan support yang tak terhingga.
2. Abah Mathori Al-Hafidz dan Ibu Nyai Musholihah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Mubarak.
3. Kakak saya Rian Abadi dan Taba Afri Khasma serta adik saya Maulida Oktavia Azzahra yang senantiasa menghibur dan memberikan dukungan.
4. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Dosen pembimbing, Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak., MSA., CA
6. Dosen Wali, Bapak H. Gunawan Aji, M.Si
7. Diri saya sendiri yang telah berjuang sampai sejauh ini tanpa rasa lelah.
8. Seluruh Sahabat saya Muhammad, Enu, Dina, Nabila, Namasawi, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Teman seperjuangan Aksya A Family angkatan 2019 yang selalu memberi semangat.
10. Seluruh sahabat HMJ Akuntansi Syariah periode 2020, UKM-F Dycres FEBI periode 2021 dan 2022 yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman

ABSTRAK

DWI TIA NINGRUM. Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021).

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor keuangan dan karakteristik pemerintah daerah terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021.

Riset ini menggunakan jenis riset asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Dalam menentukan sampel, menggunakan metode *purposive sampling* dengan populasi semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021. Penelitian ini memanfaatkan delapan variabel bebas dan instrumen olah data yang digunakan berupa *Microsoft Excel* dan *Econometric Views (E-Views)* versi 10 dengan model regresi data panel.

Hasil dalam penelitian ini yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap *financial distress*. Sementara enam variabel lainnya (rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, rasio solvabilitas luas wilayah, jumlah penduduk, dan opini audit) tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Variabel bebas hanya dapat menjelaskan sebesar 0,345783. Artinya hanya 34,57% terhadap *financial distress*. Sementara sisanya 65,43% dijelaskan oleh variabel independen lain diluar penelitian.

Kata Kunci: Faktor Keuangan, Financial Distress, Karakteristik Pemerintah, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

DWI TIA NINGRUM. The Effect of Financial Factors and Local Government Characteristics on Financial Distress (Empirical Study of Cities and Districts in Central Java Province for the 2017-2021 Period).

This research was conducted in the local government of cities and regencies in Central Java Province. The purpose of this study was to identify and analyze the effect of financial factors and local government characteristics on financial distress in city and district regional governments in Central Java Province for the 2017-2021 period.

This research uses causal associative research with a quantitative approach. In determining the sample, a purposive sampling method was used with a population of all regencies and cities in Central Java Province for the 2017-2021 period. This study utilized eight independent variables and data processing instruments used in the form of Microsoft Excel and Econometric Views (E-Views) version 10 with a panel data regression model.

The results in this study are the effectiveness ratio and efficiency ratio that affect financial distress. While the other six variables (income growth ratio, independence ratio, solvency ratio for area, population, and audit opinion) have no effect on financial distress. The independent variable can only explain 0.345783. This means only 34.57% of financial distress. While the remaining 65.43% is explained by other independent variables outside the study.

Keywords: *Financial Factors, Financial Distress, Government Characteristics, Public Services*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Tamamudin, M.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak., MSA., CA selaku Dosen Pembimbing dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. H. Gunawan Aji, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu

selama berada di bangku perkuliahan

8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material, semangat dan support tiada henti.
9. Seluruh sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 10 Januari 2023



Dwi Tia Ningrum
4319026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Landasan Teori	21
B. Telaah Pustaka	31
C. Kerangka Berpikir	36
D. Pengembangan Hipotesis Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Setting Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	45
E. Teknik Pengambilan Sampel	45
F. Definisi Operasional Variabel	46
G. Sumber Data	48

H. Teknik Pengumpulan Data	48
I. Metode Analisis Data	49
BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Deskripsi Objek Penelitian	55
B. Analisis Data.....	56
C. Pembahasan	77
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Keterbatasan dan Saran	93
C. Implikasi	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1: Populasi dan Sampel	I
Lampiran 2 : Data Mentah Penelitian	II
Lampiran 3 : Data Perhitungan Financial Distress	VI
Lampiran 4 : Data Perhitungan Rasio Efektivitas.....	X
Lampiran 5 : Data Perhitungan Rasio Efisiensi	XIV
Lampiran 6 : Data Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD.....	XVIII
Lampiran 7 : Data Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan.....	XXII
Lampiran 8 : Data Perhitungan Rasio Solvabilitas	XXVI
Lampiran 9 : Opini Audit.....	XXX
Lampiran 10 : Hasil Uji Data Statistik Deskriptif.....	XXXII
Lampiran 11 : Hasil Uji Data Common Effect Model.....	XXXIII
Lampiran 12 : Hasil Uji Data Fixed Effect Model.....	XXXIV
Lampiran 13 : Hasil Uji Data Random Effect Model	XXXV
Lampiran 14 : Hasil Uji Chow	XXXVI
Lampiran 15 : Hasil Uji Hausman	XXXVII
Lampiran 16 : Hasil Normalitas.....	XXXVIII
Lampiran 17 : Hasil Multikolinearitas	XXXIX
Lampiran 18 : Hasil Heteroskedastisitas.....	XL
Lampiran 19 : Hasil Uji Hipotesis	XLI
Lampiran 20 : Surat Penelitian	XLII
Lampiran 21 : Riwayat Hidup Penulis	XLIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		آ = ā
ي = i	اي = ai	إي = ī
و = u	او = au	أو = ū

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ا...ا...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي...ي...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرأة جمّلك ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة ditulis *fāṭimah*

5. *Syaddad* (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddad tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدع	Ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

7. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ^/ . Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai`un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmūl-Khalīl
-------------------------	---------------------------------------

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hasil Survei Kepatuhan Instansi Republik Indonesia.....	1
Tabel 1. 2 Perbandingan Alokasi Belanja Pegawai dan Total Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	6
Tabel 2. 1 Riset Terdahulu	31
Tabel 3. 1 Sampel Penelitian.....	45
Tabel 3. 2 Definisi Operasional	47
Tabel 4. 1 Pemerintah Kota dan Kabupaten yang menjadi Sampel.....	55
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif.....	57
Tabel 4. 3 Hasil Model Regresi Data Panel Common Effect	63
Tabel 4. 4 Model Regresi Data Panel Fixed Effect.....	63
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow.....	64
Tabel 4. 6 Hasil Model Regresi Data Panel Random Effect.....	65
Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman	66
Tabel 4. 8 Hasil Regresi Model FEM	67
Tabel 4. 9 Uji Heteroskedastisitas.....	71
Tabel 4. 10 Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4. 11 Hasil Uji t.....	73
Tabel 4. 12 Uji Simultan	76
Tabel 4. 13 Koefisien Determinasi.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	36
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	71

DAFTAR ISTILAH

Krusial: penting atau esensial untuk memecahkan masalah

Viral : berkaitan dengan virus, atau menyebar luas dan cepat seperti virus.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Populasi dan Sampel	I
Lampiran 2 : Data Mentah Penelitian	II
Lampiran 3 : Data Perhitungan Financial Distress	VI
Lampiran 4 : Data Perhitungan Rasio Efektivitas.....	X
Lampiran 5 : Data Perhitungan Rasio Efisiensi	XIV
Lampiran 6 : Data Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD.....	XVIII
Lampiran 7 : Data Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan	XXII
Lampiran 8 : Data Perhitungan Rasio Solvabilitas	XXVI
Lampiran 9 : Opini Audit.....	XXX
Lampiran 10 : Hasil Uji Data Statistik Deskriptif.....	XXXII
Lampiran 11 : Hasil Uji Data Common Effect Model.....	XXXIII
Lampiran 12 : Hasil Uji Data Fixed Effect Model.....	XXXIV
Lampiran 13 : Hasil Uji Data Random Effect Model	XXXV
Lampiran 14 : Hasil Uji Chow	XXXVI
Lampiran 15 : Hasil Uji Hausman	XXXVII
Lampiran 16 : Hasil Normalitas.....	XXXVIII
Lampiran 17 : Hasil Multikolinearitas	XXXIX
Lampiran 18 : Hasil Heteroskedastisitas.....	XL
Lampiran 19 : Hasil Uji Hipotesis	XLI
Lampiran 20 : Surat Penelitian	XLII
Lampiran 21 : Riwayat Hidup Penulis.....	XLIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesuksesan otonomi daerah dapat tercermin dari kualitas pelayanan publik yang diberikan. Citra positif suatu pemerintah daerah juga dapat terlihat dari kualitas pelayanan publiknya. Kualitas pelayanan publik di Indonesia menduduki peringkat ke- 82 dari 176 negara. Hal ini berdasarkan hasil survei kepuasan *The Global Economy* pada tahun 2019. Menurut Nainggolan (2020) negara dengan pelayanan terbaik adalah Negara Finlandia, Negara Belanda, Negara Jerman, Negara Norwegia, dan Negara Swedia. Sementara pada tahun 2021, berdasarkan UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009, undang-undang yang mengatur mengenai pelayanan publik melakukan survei kepatuhan dari instansi di Negara Indonesia yaitu dengan 15 lembaga, 98 kota, 24 kementerian, 34 provinsi, dihasilkan data sebagai berikut (Ombudsman Republik Indonesia, 2021, hlm. 66–67).

Tabel 1. 1 Hasil Survei Kepatuhan Instansi Republik Indonesia

Instansi	Kategori			Jumlah
	Merah	Kuning	Hijau	
Kementerian	0	7	17	24
Lembaga	0	3	12	15
Provinsi	2	19	13	34
Kota	3	61	34	98

Sumber: (Ombudsman Republik Indonesia, 2022)

Berdasarkan hasil survei kepatuhan tersebut, penilaian kepatuhan dikategorikan menjadi tiga yaitu rapor merah untuk instansi dengan kepatuhan rendah, rapor kuning untuk instansi dengan kepatuhan cukup atau sedang, dan

rapor hijau untuk instansi dengan kepatuhan tinggi. Sehingga mengacu pada rapor tersebut dapat dikatakan pelayanan publik di lingkungan kementerian dan lingkungan lembaga tinggi. Akan tetapi, di lingkungan provinsi dan kota cukup atau sedang.

Merujuk pada hasil tersebut, secara umum pelayanan publik di Indonesia perlu ada pembenahan. Hal ini dikuatkan dengan adanya pengaduan tentang kualitas layanan yang dirasa cukup rendah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.690 pengaduan serta mengenai kualitas layanan yang khusus pada tingkat pemerintah daerah sebanyak 2.274 pengaduan (Nainggolan, 2020). Data di atas juga menunjukkan kualitas layanan publik di Indonesia masih harus ditingkatkan termasuk di pemerintah daerah, yang masih tinggi tingkat kepatuhan sedang dan tingkat kepatuhan rendah. Padahal pelayanan publik menjadi hal yang krusial. Bahkan menurut Ria, dkk (2015) pelayanan publik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah.

Berkaitan dengan pelayanan publik dalam Islam, Islam juga menaruh perhatian yang besar terhadap pelayanan publik. Bahwasanya konsep seorang pejabat hendaknya menjalankan amanah dan berbuat adil terhadap rakyatnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 58.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Menurut Yusuf al-Qardhawi, ayat tersebut ditujukan kepada para pejabat agar melaksanakan amanat dan ditujukan kepada hakim agar menghukumi dengan adil. Hal tersebut merupakan peringatan akan adanya kerusakan umat dan negara jika kedua hal tersebut tidak dilaksanakan. (Musyafaah dan Wijaya, 2020). Maka dari itu pemerintah sudah semestinya memberikan pelayanan terbaiknya kepada rakyat sesuai dengan porsi peraturan yang ada.

Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi publik yang menaungi dan dimiliki oleh suatu daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang bupati atau walikota. Kewenangan pemerintah daerah merupakan instruksi dari pemerintah pusat berdasarkan otonomi daerah. Salah satu kewenangan tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur pendapatan serta belanja untuk menjalankan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Maka dari itu perlu diketahui kondisi keuangan pemerintah daerah agar tujuan utama terlaksananya otonomi daerah bisa tercapai tanpa terkendala kesulitan keuangan atau biasa disebut dengan *financial distress*.

Menurut Rizki, dkk (2021) *financial distress* adalah salah satu berita atau kabar yang tidak menyenangkan. *Financial distress* merupakan hal asing yang pertama kali dikenalkan di sektor swasta seperti perusahaan. Akan tetapi hal ini juga dapat terjadi pada sektor publik seperti pemerintahan. Menurut Pitaloka dan Guritno (2021), *financial distress* merupakan keadaan keuangan yang mengalami penurunan atau kemerosotan sehingga dapat menyebabkan

kinerja keuangan tidak stabil. Menurut Yanti (2018) *financial distress* yang terjadi di pemerintahan adalah ketidaksanggupan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang telah disetujui dan ditetapkan. Di negara-negara Eropa, adanya *financial distress* disebabkan karena angka defisit yang terlalu tinggi dengan kenaikan pendapatan yang tidak mampu menutup defisit anggaran pengeluaran. Sehingga tidak mampu memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.

Angka defisit yang terlalu tinggi juga terjadi pada salah satu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Joglosemar.com (2022) disebutkan bahwa pada tahun 2023 diproyeksikan Kabupaten Sragen memiliki defisit yang mencapai Rp 315 miliar. Sebelumnya pada tahun 2022 Kabupaten Sragen juga mengalami defisit sebesar Rp. 285 miliar. Kenaikan defisit Rp. 30 miliar tersebut merupakan sejarah terbesar Kabupaten Sragen. Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi II, angka tersebut dapat naik lebih tinggi lagi. Alasan adanya angka defisit tersebut karena anggaran belanja rutin untuk pembayaran gaji pegawai dan pegawai pemerintah kontrak (PPPK). Kabupaten Sragen akan menutup angka defisit dengan Silpa tahun berjalan. Akan tetapi menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi II, terlalu besarnya angka defisit tersebut menunjukkan ketidakseimbangan komposisi anggaran. Sehingga dapat terindikasi adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan pemerintah

Menurut Windiyanti & Isfaatun (2019) *financial distress* menjadi titik masalah pemerintah yang tidak memiliki anggaran dalam mencukupi

penyediaan pelayanan publik. *Financial distress* dalam sektor publik adalah kurangnya kemampuan pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya baik aktivitas operasi, hutang, infrastruktur, maupun pembangunan lainnya yang bertujuan memenuhi pelayanan kepada masyarakat sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Andita (2016) *financial distress* dapat berpotensi tinggi jika pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah dengan proporsi yang tidak seimbang yaitu belanja pegawai melebihi proporsi target sedangkan belanja modal kurang dari proporsi pada umumnya. Padahal alokasi pada belanja modal memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang sering terjadi dan berhubungan dengan *financial distress* biasanya disebabkan oleh pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang dari 30% sehingga daerah tersebut belum bisa atau belum mampu melakukan investasi dengan baik dalam semua kegiatan pemerintahan yang bertujuan memberikan layanan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat atau publik. Fenomena ketimpangan pada alokasi belanja tersebut dapat menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal.

Menurut Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwasanya standar mutu yang sudah ditetapkan kepada tiap-tiap daerah untuk menghadapi *financial distress* ditetapkan minimum 30% untuk masing-masing belanja modal tiap daerah (Berita satu, 2021). Hal ini dikuatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) juga dijelaskan bahwa persentase belanja modal yang menjadi tolak ukur *financial distress* dalam sebuah daerah harus berpori minimal 30% (Elfiyana dan Arza, 2022)

Sementara berdasarkan data forum indonesia untuk transparansi anggaran, struktur belanja daerah Provinsi Jawa Tengah masih didominasi oleh belanja pegawai pada tahun 2011. Bahkan lima kabupaten di Provinsi Jawa Tengah masuk dalam daftar kota dan kabupaten yang memiliki belanja pegawai melebihi 60% dalam APBD 2011. Yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Karanganyar. Sedangkan belanja modal rata-rata hanya 15% (ICW, 2011). Berikut ini akan disajikan tabel perbandingan pengalokasian belanja pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

Tabel 1. 2 Perbandingan Alokasi Belanja Pegawai dan Total Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No.	Nama Kota dan Kabupaten	Alokasi Belanja Pegawai	Alokasi Belanja Modal
1	Kabupaten Banjarnegara	40%	14%
2	Kabupaten Banyumas	50%	15%
3	Kabupaten Batang	51%	14%
4	Kabupaten Blora	40%	14%
5	Kabupaten Boyolali	50%	24%
6	Kabupaten Brebes	34%	14%
7	Kabupaten Cilacap	37%	18%
8	Kabupaten Demak	45%	15%
9	Kabupaten Grobogan	37%	12%
10	Kabupaten Jepara	38%	10%
11	Kabupaten Karanganyar	53%	11%
12	Kabupaten Kebumen	41%	10%
13	Kabupaten Kendal	47%	7%
14	Kabupaten Klaten	55%	10%
15	Kabupaten Kudus	54%	10%
16	Kabupaten Magelang	49%	14%

No.	Nama Kota dan Kabupaten	Alokasi Belanja Pegawai	Alokasi Belanja Modal
17	Kabupaten Pati	52%	14%
18	Kabupaten Pekalongan	46%	10%
19	Kabupaten Pemalang	54%	9%
20	Kabupaten Purbalingga	56%	12%
21	Kabupaten Purworejo	40%	12%
22	Kabupaten Rembang	41%	10%
23	Kabupaten Semarang	48%	16%
24	Kabupaten Sragen	48%	10%
25	Kabupaten Sukoharjo	47%	16%
26	Kabupaten Tegal	47%	16%
27	Kabupaten Temanggung	36%	13%
28	Kabupaten Wonogiri	57%	19%
29	Kabupaten Wonosobo	48%	17%
30	Kota Magelang	36%	20%
31	Kota Pekalongan	41%	17%
32	Kota Salatiga	43%	14%
33	Kota Semarang	36%	20%
34	Kota Surakarta	38%	18%
35	Kota Tegal	41%	13%

Sumber: (data diolah, 2022)

Dari hasil perhitungan perbandingan di atas, pada tahun 2021 semua pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tidak mengalokasikan belanja modal minimum 30% sesuai Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Padahal belanja modal digunakan untuk kepentingan pelayanan publik seperti pembangunan akses jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan belanja pegawai yang proporsinya cenderung lebih besar dari belanja modal. Artinya mengindikasikan bahwa efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum optimal. Hal ini sejajar dengan penelitian Martini dan Dwirandra (2014) bahwa dengan tingginya belanja pegawai maka pemerintah

daerah mengalami pemborosan dalam hal belanja daerah. Karena pengeluarannya tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk belanja modal. Kondisi seperti inilah yang berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan atau *financial distress*.

Salah satu implikasi fenomena ketimpangan alokasi belanja modal dapat tercermin dari pembangunan akses jalan di beberapa titik daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Blorakab (2021), Kabupaten Blora memiliki ratusan kilometer jalan kabupaten yang kondisinya rusak sedang hingga rusak berat. Kerusakan jalan tersebut mencapai 439,45 km dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 300.000.000.000,00 untuk memperbaiki akses jalan. Hal ini menjadi salah satu masalah yang belum tercapai sesuai capaian indikator pembangunan RKPD pada triwulan kedua tahun 2021. Sehingga Pemerintah masih perlu mengusahakan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora untuk proyeksi pendanaan infrastruktur dari APBD 2022 hanya Rp. 60.000.000.000,00. Dengan adanya keterbatasan tersebut, Bupati Kabupaten Blora berencana mengajukan pinjaman kepada perbankan sebesar Rp. 250.000.000.000,00. Skema pinjaman ini merupakan pemanfaatan anggaran infrastruktur untuk tahun 2023 dan 2024, dimana akan dilaksanakan sekaligus di tahun 2022.

Selain di Kabupaten Blora, jalan rusak juga dirasakan di Kabupaten Pemalang. Menurut Puskapik (2022), akses jalan yang rusak mencapai 242, 92 km dengan komposisi jenis kerusakan ringan sepanjang 79, 5 km sementara kerusakan berat sepanjang 163, 17 km. pemerintah Kabupaten Pemalang hingga

saat ini hanya mampu memperbaiki 6% dari total jalan yang rusak. Sejatinya, Bupati Kabupaten Pemalang telah menjanjikan akses jalan dapat teratasi selama dalam waktu kurang dari satu tahun masa kepemimpinannya. Keluhan akses jalan yang belum memadai juga terjadi pada Kabupaten Grobogan.

Fenomena *crazy rich* di Kabupaten Grobogan yang membangun jalan menggunakan uang pribadinya baru-baru ini tengah viral. Berdasarkan berita Universitas Sebelas Maret (2022), *crazy rich* tersebut adalah Joko Suranto. Joko Suranto merupakan alumni dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Hukum. Fenomena ini menjadi *trending topic* dan menuai banyak komentar dari berbagai pihak warganet. Tentunya, hal tersebut memicu banyak pertanyaan mengenai apakah standar pelayanan minimal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jalan di Desa Jetis, Karangyung dibangun dengan anggaran sejumlah Rp. 2.800.000.000,00 dan dengan panjang 1,8 km. Jalan tersebut sudah 20 tahun tidak diperbaiki secara maksimal oleh pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan banyaknya faktor atau indikator yang mempengaruhi *financial distress* pemerintah daerah. Salah satunya penelitian Syurmita (2014), Wulandari et al (2020), Carolina et al (2017) yang menemukan beberapa indikator yang mempengaruhi kondisi *financial distress*. Indikator tersebut dikelompokkan pada dua faktor yaitu faktor keuangan atau *financial* dan faktor non keuangan atau karakteristik pemerintah daerah. Begitu juga dalam penelitian ini menggunakan indikator faktor keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. Menurut Zakia dan Setiawan (2021), rasio keuangan bagian dari faktor keuangan yang mempunyai

pengertian sebagai perbandingan yang diungkapkan dari berbagai pos akun dalam laporan keuangan. Rasio keuangan biasa disebut dengan istilah *financial ratio*. Menurut Simanjuntak, dkk (2017) berpendapat bahwa adanya rasio ini penting dimanfaatkan dalam analisis keuangan pemerintah maupun perusahaan. Rasio keuangan menganalisis pergerakan keuangan pada laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah salah satu bukti nyata secara tertulis yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan suatu organisasi, dalam sektor publik maupun sektor swasta. Anggaran belanja terdiri dari belanja modal, belanja operasional, dan lain-lain. Pengalokasian belanja modal merupakan kontribusi penting yang akan memberikan dampak pada segala fasilitas publik seperti pembangunan akses jalan, pembangunan sekolah, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Kinerja keuangan dapat dievaluasi dengan pengukuran yang memanfaatkan analisis perbandingan (rasio). Sehingga rasio keuangan menjadi faktor keuangan yang dapat terindikasi *financial distress* (Zakia & Setiawan, 2021). Analisis rasio memiliki berbagai macam jenis rasio seperti analisis rasio pendapatan yang meliputi rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian keuangan, rasio varians pendapatan, derajat desentralisasi, bahkan rasio ketergantungan. Selain itu juga ada analisis belanja yang meliputi rasio pertumbuhan belanja, rasio efisiensi, rasio varians belanja, sampai rasio keserasian belanja.

Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan seperti rasio efektivitas, dimana rasio ini merupakan rasio yang mendeskripsikan kinerja keuangan daerah. Alasan peneliti menggunakan rasio efektivitas karena untuk melihat tingkat efektivitas pemerintah daerah melalui kinerja keuangannya. Karena pada dasarnya, pemerintah daerah yang memiliki tingkat efektivitas baik tentu memiliki kinerja keuangan yang baik. Artinya, pemerintah daerah mampu mengelola APBD tanpa terindikasi *financial distress*. Penelitian Mohamad Iqbal (2017) dan Zakia dan Setiawan (2021) bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan dengan *financial distress*. Sementara Elfiyana dan Arza (2022) mengemukakan jika nilai rasio efektivitas penda pada uji t memiliki pengaruh terhadap *financial distress* yang signifikan.

Analisis rasio dalam riset yang kedua adalah rasio efisiensi. Rasio ini merupakan pengukuran keuangan perbandingan antara realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan yang diterima (Sartika, 2019). Alasan peneliti menggunakan rasio efisiensi dikarenakan analisis rasio efisiensi memiliki nilai kriteria yang berbanding terbalik dengan kinerja keuangan. Artinya pemerintah daerah dapat meminimalkan belanja operasional dibandingkan realisasi pendapatan. Hal ini dilakukan supaya dapat dialokasikan pada belanja modal yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah daerah yang memiliki rasio efisiensi yang kecil, tentu kinerja keuangannya bagus. Sehingga indikasi *financial distress* semakin kecil. Menurut Atmaja (2012) adanya pengaruh secara parsial antara rasio efisiensi terhadap *financial distress*. Peneliti Elfiyana dan Arza (2022) juga menegaskan jika rasio efisiensi

terhadap *financial distress* memiliki pengaruh signifikan dengan arah koefisien positif ketika melakukan uji t. Meskipun hal tersebut berbeda dengan penelitian Zakia dan Setiawan (2021) serta Wulandari dan Arza (2020) bahwa pada hasil output uji t dihasilkan jika rasio ini tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*.

Rasio pertumbuhan pendapatan merupakan pengukuran keuangan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam menstabilkan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya. Alasan peneliti memilih rasio tersebut dikarenakan rasio pertumbuhan pendapatan yang memiliki nilai positif dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dapat meminimalisir belanja operasi demi mengalokasikan belanja modal lebih baik. Maka dari itu, dapat dikatakan pemerintah daerah siap melakukan pengadaan investasi pembangunan infrastruktur segala segala sarana dan prasarana. Sehingga indikasi adanya *financial distress* dalam pemerintah daerah lebih rendah. Menurut Elfiyana dan Arza (2022), Rusdi dan Fuad (2018), serta Wulandari dan Arza (2020) pada hasil output uji t rasio ini tidak ada pengaruh pada gejala *financial distress*. Berbeda menurut Zakia dan Setiawan (2021) pada risetnya dihasilkan output parsial bahwa rasio ini ada pengaruh yang positif terhadap angka *financial distress*. Riset ini juga dilakukan oleh Eliu (2014), bahwa rasio pertumbuhan PAD ada pengaruh yang signifikan pada tingkat *financial distress* pada hasil output uji t nya.

Faktor keuangan yang keempat yaitu rasio kemandirian. Alasannya karena dengan adanya tingkat kemandirian pemerintah yang tinggi artinya

pemerintah tidak membebankan ketergantungan pada pusat/provinsi. Sehingga, dapat dikatakan jika Pemda memiliki status kinerja yang baik dalam memaksimalkan alokasi belanja modal untuk kepentingan sarana dan prasarana masyarakat. Maka dari itu, peluang adanya *financial distress* lebih kecil. Menurut Mutiara dan Lukfiah (2021), Wulandari dan Arza (2020), Rusdi dan Fuad (2018), serta Windiyanti dan Isfaatun (2019), hasil output uji t rasio ini tidak ada pengaruh terhadap *financial distress*. Sementara menurut pengujian hipotesis Mohamad Iqbal (2017), Fitriana (2017), dan Rahmat Danil (2019), dihasilkan pada output uji t rasio kemandirian keuangan ada pengaruh signifikan terhadap *financial distress* meskipun dengan arah koefisien negatif. Berbeda arah koefisien dengan riset Elfiyana dan Arza (2022) bahwa pada output uji t kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan positif pada *financial distress*.

Variabel pada faktor keuangan yang terakhir adalah rasio solvabilitas. Alasannya karena rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutangnya dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Semakin banyak aset yang dibiayai oleh hutang maka akan semakin besar kesulitan keuangan daerah karena pemerintah daerah memiliki kewajiban yang besar untuk membayar hutang. Sehingga rasio solvabilitas yang tinggi menandakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mengalokasikan belanja modalnya. Penelitian Atmaja (2012) menunjukkan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil yang serupa dilakukan oleh Islamiyatun (2021) bahwa rasio solvabilitas (*debt ratio*) berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap kondisi financial distress. Sementara menurut Pangku dan Radjak (2021) rasio solvabilitas tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen *financial distress*.

Karakteristik pemerintah daerah memiliki ciri tersendiri atau ciri khas yang menjadi pembeda dengan pemerintah daerah lainnya. Karakteristik pemerintah daerah meliputi luas wilayah, pemekaran wilayah, ukuran pemerintah, jumlah populasi, umur daerah, latar belakang kepala daerah, hingga kesejahteraan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel luas daerah/wilayah. Luas wilayah/daerah adalah rubrik geografis yang mempunyai sistem kelembagaan dilihat dari aspek fungsional dan aspek administratif. Menurut penelitian Wulandari dan Arza (2020) diinterpretasikan uji t bahwa luas wilayah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress*. Riset ini satu haluan dengan riset yang dilakukan Mutiara dan Arza (2019) jika luas wilayah pada uji t memiliki pengaruh positif pada *financial distress*. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil riset Zakia dan Setiawan (2021) bahwa luas wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Jumlah penduduk merupakan seluruh masyarakat yang menetap berdasarkan aspek administratif dan fungsional pada suatu wilayah. Masyarakat yang tercantum dalam angka jumlah penduduk pemerintah daerah, tentunya di dalamnya ada segenggam hak & kewajibannya dalam mempergunakan fasilitas publik untuk kesejahteraan mereka. Tidak hanya itu, masyarakat tersebut juga berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Wulandari dan Arza (2020) pada hasil uji t jumlah penduduk ada pengaruh pada

terhadap indikasi *financial distress* yang signifikan. Penelitian ini berbeda dengan Zakia dan Setiawan (2021) bahwa Kompleksitas Pemerintah Daerah (Jumlah Penduduk) tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini didukung dengan penelitian Mutiara dan Suyatmin (2018).

Variabel terakhir pada penelitian ini bagian dari karakteristik pemerintah daerah adalah opini audit. Opini audit merupakan opini/pendapat yang dikeluarkan oleh BPK setempat berdasarkan analisis laporan keuangannya. Opini audit adalah independensi auditor dalam memberikan kesimpulan tentang kondisi laporan keuangan berdasarkan tingkat kewajaran informasi. Menurut oleh Zakia dan Setiawan (2021) pada risetnya memperoleh output uji t bahwa variabel ini tidak ada pengaruh apapun pada *financial distress* dengan arah koefisien negatif. Hasil ini juga sama dengan penelitian Wulandari dan Arza (2020). Hasil penelitian ini berbeda dengan riset Indriaty (2018), opini audit berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Wicaksono (2015) jika variabel opini audit berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan fenomena permasalahan di atas dan adanya kesenjangan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun Periode 2017-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah rasio efektivitas berpengaruh terhadap *financial distress* di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah rasio efisiensi berpengaruh terhadap *financial distress* di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *financial distress* di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah rasio kemandirian keuangan berpengaruh terhadap *financial distress* di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap *financial distress* di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah?
6. Apakah luas wilayah berpengaruh terhadap *financial distress* di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah?
7. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap *financial distress* di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah?
8. Apakah opini audit BPK berpengaruh terhadap *financial distress* di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah?
9. Apakah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, luas wilayah, jumlah penduduk, dan opini audit BPK berpengaruh terhadap *financial distress* di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efektivitas terhadap *financial distress* pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021.
- b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efisiensi terhadap *financial distress* pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021.
- c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap *financial distress* pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021.
- d. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial distress* pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021.
- e. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio solvabilitas terhadap *financial distress* pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021.
- f. Mengetahui dan menganalisis pengaruh luas wilayah terhadap *financial distress* pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021.
- g. Mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap *financial distress* pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021.

- h. Mengetahui dan menganalisis pengaruh opini audit BPK terhadap *financial distress* pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021.
- i. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, luas wilayah, jumlah penduduk, dan opini audit BPK terhadap *financial distress* pada Pemda kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Teoritis

1) Akademis

Berdasarkan manfaat teoritis pada bab akademis, diharapkan melalui penelitian ini dapat memperluas dunia keilmuan atau pengetahuan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta dapat menjadi bahan referensi atau telaah pustaka bagi peneliti lain yang berkaitan dengan *financial distress* dalam pemerintah.

2) Peneliti

Berdasarkan manfaat teoritis untuk peneliti lain, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan tentang faktor keuangan seperti rasio pertumbuhan PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio solvabilitas, dan lain-lain.

Selain itu juga dapat menambah pengetahuan tentang karakteristik pemerintah daerah seperti luas daerah dan jumlah penduduk daerah. Serta menambah pengetahuan mengenai faktor pengaruh dari adanya *financial distress* dalam pemerintah.

b. Praktis

1) Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan referensi tempat keterbukaan dan ketransparansian kepada masyarakat mengenai pelayanan publik pemerintah di Provinsi Jawa Tengah.

2) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mempertimbangkan penilaian kinerja setiap instansi. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bentuk keakuntabilisan pelayanan publik kepada masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimanfaatkan guna memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi dalam penelitian yang telah disesuaikan berlandaskan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2022. Sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi titik dasar peneliti melakukan penelitian tentang *financial distress* yang

dipengaruhi oleh faktor keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. Rumusan masalah yang berisi pertanyaan mengenai penelitian tersebut. Tujuannya untuk mengetahui hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Sementara manfaat penelitian adalah harapan peneliti supaya penelitian ini mampu memberikan kebermanfaatan bagi banyak pihak.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjabarkan teori secara lebih luas sebagai dasar penelitian serta review dari riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan sebagai acuan peneliti dalam memecahkan rumusan masalah. Pada bagian ini juga melampirkan kerangka berfikir disertai hipotesis penelitian sebagai praduga yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bab yang isinya terdiri dari jenis, pendekatan, setting, populasi dan sampel, variabel, sumber data, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data yang digunakan pada penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data penelitian yang diperoleh pada pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan pembahasan mengenai hasil analisis data yang diinterpretasikan secara sederhana guna menjawab permasalahan pokok dalam rumusan masalah.

BAB V SIMPULAN

Bagian akhir dalam penelitian ini berkaitan dengan penyampaian simpulan dari riset, keterbatasan dan saran untuk peneliti yang akan datang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu hasil analisis data yang diolah dengan bantuan aplikasi *E-Views 10*, dapat ditarik beberapa benang merah yang dijadikan simpulan riset sebagai berikut.

1. Rasio efektivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Artinya rasio efektivitas secara parsial memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Semakin tinggi efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin rendah potensi terjadinya *financial distress*.
2. Rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Artinya rasio efisiensi secara parsial memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin rendah potensi terjadinya *financial distress*.
3. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Alasannya karena ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan yaitu pengalokasian belanja modal yang belum memenuhi target dengan persentase minimal 30%.
4. Rasio kemandirian keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Semakin tinggi kemandirian keuangan

pemerintah daerah berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga tidak berpotensi terindikasi *financial distress*.

5. Rasio solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Artinya semakin tinggi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya maka cenderung tidak mengalami *financial distress*.
6. Luas wilayah secara parsial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Artinya semakin luas daerah yang dimiliki suatu pemerintah kota dan kabupaten, apabila diimbangi dengan pendapatan per kapita yang tinggi tentu tidak berpengaruh terhadap indikasi masalah *financial distress*.
7. Jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Alasannya jumlah penduduk yang masuk dalam jangkauan pemerintah justru akan memberikan kontribusi pada pemerintah berupa pendapatan retribusi pajak hingga retribusi daerah.
8. Opini audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Alasannya persentase alokasi belanja modal yang tidak sesuai standar (minimal 30%) tidak dapat hanya dilihat dari opini audit saja.
9. Rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian keuangan, rasio solvabilitas, luas daerah, jumlah penduduk, dan opini audit BPK secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.

B. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Keterbatasan pada objek penelitian, dimana penelitian terbatas hanya mengambil objek pada Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021 yang memenuhi kriteria, sehingga masih banyak kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang tidak menjadi sampel penelitian.
2. Keterbatasan pada rentang waktu penelitian, yakni hanya dalam rentang waktu 5 tahun mulai dari tahun 2017-2021.
3. Keterbatasan pada variabel penelitian, yakni hanya pada variabel bebas “Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Kemandirian, Rasio Solvabilitas, Luas Daerah, Jumlah Penduduk, Daerah dan Opini Audit BPK”.

Sehingga berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka disampaikan saran baik bagi pemerintah daerah maupun bagi peneliti lainnya, diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan lagi belanja modal pada APBD dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor keuangan dan karakteristik daerah yang dimilikinya dalam mengelola keuangan pemerintah agar terhindar dari indikasi *financial distress*. Tentunya disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menitikberatkan bahwa alokasi belanja modal harus berporosi minimal 30%.

2. Bagi peneliti lainnya, diharapkan keterbatasan dalam penelitian ini dapat disempurnakan dan dikembangkan antara lain sebagai berikut.
 - a. Dengan menggunakan kriteria sampel yang lebih valid supaya data sampel yang diperoleh lebih banyak dan dapat menambah periode penelitian agar dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat,
 - b. Dengan memperbanyak variabel bebas yang memiliki korelasi atau pengaruh lebih besar pada indikasi *financial distress*, seperti ukuran pemerintah, umur pemerintah, rasio derajat desentralisasi, dan lain-lain,
 - c. Dengan memperluas populasi yang digunakan ke beberapa daerah maupun provinsi lainnya (salah satunya Provinsi Jawa Timur yang memiliki kota dan kabupaten terbanyak atau dalam lingkup nasional yaitu kota dan kabupaten di seluruh Indonesia),
 - d. *Financial distress* pada sektor publik seperti pemerintah belum ada pengukuran kuantitatifnya. Sehingga untuk perhitungannya tidak hanya mengacu pada rumus penelitian ini, bisa juga dengan menerapkan rumus DSCR sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Peneliti mengharapkan supaya hasil riset yang telah dilakukan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang khususnya lingkup UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan umumnya semua peneliti. Serta dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya pada analisis rasio. Mengingat belum banyak riset mengenai *financial distress* pada

2. Implikasi Praktis

Fenomena “financial distress” yang ada pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan pemda termotivasi untuk meningkatkan kinerja otonomi daerahnya. Serta kesadaran setiap pemda dalam mengoptimalkan anggaran belanja modal

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. P. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis (Edisi 1.)*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat. *Jurnal Literasi Hukum*, Volume 3 Nomor 2.
- Amalia, Dkk. (2020). *Underground Economy: Teori & Catatan Kelam*. Yayasan Kita Menulis.
- Atmaja, K. F. (2012). Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kemungkinan Financial Distress. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/Aaj.V1i2.557>
- Ayuningtyas, A. (2016). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Solvabilitas, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Universitas Negeri Jakarta.
- Basuki, A. T. (2014). *Penggunaan SPSS Dalam Statistik*. Yogyakarta: Penerbit Danisa Media.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dwitayanti, Armaini, Aprianti, Y., Rosy, Siska. (2020). Analisis Pengaruh Budgetary Solvency Ratio Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4, 137–144.
- Elfiyana, E., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Faktor Keuangan Terhadap Kondisi Financial Distress Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), Art. 2. <https://doi.org/10.24036/Jea.V4i2.500>
- Eliu, V. (2014). Pengaruh Financial Leverage Dan Firm Growth Terhadap Financial Distress. *Finesta*, 2(2), 6–11.
- Firmansyah, A., & Triastie, A. G. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko Efisiensi Investasi* (1 Ed.). Cv Adanu Abimata.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (Pertama)*. IRDH.

- Fitri Mariana, T. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Darma Persada
- Fitriana, Y. (2017). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Prediksi Financial Distress (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2013-2014). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Ghozali, I. (2016). Applications Multivariate Analysis With SPSS Advanced. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardani, N., Andriani, H., & Auliya, H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Cv. Pustaka Ilmu.
- Illahi, F., Dkk. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi Dan Keselarasan Belanja Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017. Pareso Jurnal, 3(3). <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/pj/article/download/365/372>
- Indriaty, N. (2018). Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Di Indonesia. In Seminar Nasional Dan Call For Paper III Fakultas Ekonomi, 19.
- Indonesia Corruption Watch. (2011). Belanja Pegawai Lima Kabupaten di Jateng Melebihi 60 Persen. <https://www.antikorupsi.org/id/article/belanja-pegawai-lima-kabupaten-di-jateng-melebihi-60-persen>
- Iqbal, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemungkinan Terjadinya Financial Distress Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia. Universitas Jenderal Soedirman
- Islamiyatun, S. B. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Kondisi Financial Distress. Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2), Art. 2. <https://doi.org/10.31000/Competitive.V5i2.4125>
- Junjuran, M. I., & Nawangsari, A. T. (2021). Pengolahan Data Statistik Dengan Menggunakan Eviews Dalam Penelitian Bisnis. Insan Cendekia Mandiri.
- Kabupaten Blora. (2021). Kerusakan Jalan Kabupaten Blora Mencapai 439,45 Km, Anggaran Terbatas Muncul Opsi Hutang. Pemerintah Kabupaten Blora. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3665/Kerusakan-Jalan-Kabupaten-Blora-Mencapai-439,45-Km,-Anggaran-Terbatas-Muncul-Opsi-Hutang>
- Kadafi, M., Amirudin, S. E., & Wulaningrum, R. (2022). Memprediksi Financial Distress Kabupaten/Kota Di Indonesia. CV Literasi Nusantara Abadi.

- Kariyoto. (2017). *Analisa Laporan Keuangan (Pertama)*. Ub Press.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish.
- Kominfo Cilacap. (2021). *Didera Pandemi Covid-19, Nilai Inflasi Cilacap Masih Terkendali*. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/didera-pandemi-covid-19-nilai-inflasi-cilacap-masih-terkendali/#:~:text=Di%20samping%20itu%2C%20lanjut%20Bupati,di%20tetapkan%20yakni%20sebesar%2069%2C10>
- Kppod. (2012). *Belanja Pegawai Dibatasi*. Diambil 18 Februari 2023, Dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=185>
- Kristianus, Arnoldus. (2021). *Kemdagri Minta Pemda Tingkatkan Alokasi Belanja Modal*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/769737/kemdagri-minta-pemda-tingkatkan-alokasi-belanja-modal/amp>
- Kundhimiarso, H. (2022, Maret 14). *Duh! Tahun Ini Jalan Rusak Di Pemalang Hanya Diperbaiki 6 Persen*. Puskapik.Com. <https://www.puskapik.com/27827/Berita/Duh-Tahun-Ini-Jalan-Rusak-Di-Pemalang-Hanya-Diperbaiki-6-Persen/>
- Martini, K., & Dwirandra, A. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali*. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(1), 1–14. <https://ojs.unud.ac.id>
- M.M, H. I., S. E., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi Spss Dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. Deepublish.
- Musyafaah, N.L., Wijaya, A. (2020). *Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. *Jurnal Ad- Daulah* Volume 10 Nomor 2
- Nainggolan, E. U. (2020). *Quo Vadis Layanan Publik Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/13189/quo-vadis-layanan-publik-indonesia.html>
- Novi, P. (2018). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wonogiri)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Nursiyono, J. A., & Nadeak, P. (2016). *Setetes Ilmu Regresi Linier Untuk Penelitian*. Media Nusa Creative.

- Panjawa, Jihad Lukis., dan Sugiharti, Retno. (2021). Pengantar Ekonometrika Dasar Teori dan Aplikasi Praktis Untuk Sosial-Ekonomi. Magelang: Pustaka Rumah Cinta
- Pangku, M., & Radjak, L. I. (2021). Analisis Financial Distress Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018. *Jsap: Journal Syariah And Accounting Public*, 4(1), 1–8.
- Pasoloran, Oktavianus. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 419-432
- Pitaloka, H., & Guritno, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Switching Dengan Financial Distress Sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (Jaais)*, 2(2), Art. 2. <https://doi.org/10.28918/Jaais.V2i2.4244>
- Pratiwi, M. G., & Drs. Suyatmin Waskito Adi, M. S. (2018). Prediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2014. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Priyatno, D. (2022). Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan Spss Dan Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews (1 Ed.). Cahaya Harapan.
- Purwanto, W. H. (2022, Maret 25). Syiar Islam: Menjadi Pemimpin Amanah. Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya. fpsc.uin-suka.ac.id/blog/2022/03/25/menjadi-pemimpin-amanah
- Rachmadi, M., & Muslim, M. (2016). Manajemen Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam (Studi Di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Pekanbaru). *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), Art. 2. <https://doi.org/10.31958/Juris.V14i2.304>
- Rahmadana, M. dkk (2020). Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis.
- Rahmat Danil, I. (2019). Analisis Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2017. Politeknik Negeri Sriwijaya
- Ratnasari, Ni Putu Anik Mas. Kencana, I Putu Eka Nila. Gandhiadi, G K. (2014). Aplikasi Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Fixed Effect Model (Studi Kasus: PT PLN Gianyar). *E-Jurnal Matematika*, 3(1)
- Rusdi, D., & Fuad, K. (2018). Metode Prediksi *Financial Distress* di Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah untuk Mengukur Kesejahteraan Ummat. *Akuntansi Dewantara*, 2(1)

- Sabella, R. F., Alfizahri, N., & Izfahany, F. (2021). Financial Distress Dan Audit Report Lag Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (Jaais)*, 2(1), Art. 1. <https://doi.org/10.28918/Jaais.V2i1.4093>
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425–1436.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), Art. 2. <https://doi.org/10.35314/Inovbiz.V7i2.1207>
- Sarwono, J. (2017). *Mengenal Prosedur-Prosedur Populer Dalam Spss 23*. Elex Media Komputindo.
- Sasmita, R. P. H. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Bpk Terhadap Understandability Dalam Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Modus*, 33(1), 98–119.
- Sholihah, R. A., Rosidi, R., & Purnomosidhi, B. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Tujuan Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Di Kota Malang). *El Dinar*, 3(1), 41–81.
- Simanjuntak, C., Titik K, F., & Aminah, W. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011- 2015). 4(2).
- Sinarto, Veronika., dan Wenny, C. D (2017). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Pergantian Manajemen, Opini Audit, dan Financial Distress Terhadap Auditor Switching Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2013-2016. *STIE Multi Data Palembang*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Thian, A. (2022). *Analisa Fundamental*. Penerbit Andi.
- Tri Wahyudi, S. (2016). *Proses Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-View*. Rajawali Pers.
- Universitas Sebelas Maret, H. (2022, April 30). Viral Di Tiktok, Alumnus Uns “Crazy Rich” Grobogan Disambut Meriah Saat Pulang Kampung. Universitas Sebelas Maret. <https://uns.ac.id/id/uns-update/viral-di-tiktok-alumnus-uns-crazy-rich-grobogan-disambut-meriah-saat-pulang-kampung.html>

- Wardoyo, P. (2022, Juli 19). Dprd Prihatin Defisit Apbd Sragen 2023 Capai Rp 315 Miliar. Disebut Terbesar Sepanjang Sejarah » Joglosemar News. <https://joglosemarnews.com/2022/07/dprd-prihatin-defisit-apbd-sragen-2023-capai-rp-315-miliar-disebut-terbesar-sepanjang-sejarah/>
- Wicaksono, A. (2015). Financial Distress Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia. Sebelas Maret University. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/47741/financial-distress-pada-pemerintah-daerah-kabupaten-dan-kota-di-indonesia>
- Windiyanti, R., & Isfaatun, E. (2019). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Rasio Solvabilitas, Kompleksitas, Dan Umur Pemerintahan Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 15(02).
- Wulandari, I., Nugraeni, N., & Wafa, Z. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 100. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.639>
- Wulandari, Y., & Indra Arza, F. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3160–3178. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.276>
- Yanti Damai, R. (2018). Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Zakia, R., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 653–671. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.387>